



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIANJUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Adapun LKjIP ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Cianjur, Februari 2022
Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur,

HERI SUPARJO, SKM. MH
NIP. 19670910 198901 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2021 ini menjabarkan hasil kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2021 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur tahun 2021 dinyatakan “berhasil” dari target yang ditetapkan. Tahun 2021 pengukuran kinerja dilakukan melalui 3 sasaran strategis (Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas; Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak) dengan 4 indikator kinerja sasaran (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksinya (Total Fertility Rate / TFR); Persentase keluarga sejahtera; Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintah dan politik dan Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti). Pemilihan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Dinas ini didasarkan pada penggabungan Renstra dan Perjanjian Kinerja dengan pertimbangan akan menjadi daya ungkit yang besar terhadap proses pembangunan nasional khususnya dibidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2021 ini, secara keseluruhan memaparkan berbagai keberhasilan, termasuk kendala dalam mencapai Sasaran Strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi di masa yang akan datang dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini. Salah satu hal yang perlu untuk segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik dan didukung dengan penggunaan teknologi informasi serta sinergitas dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dinas/instansi terkait dan Lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan kependudukan, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk :

1. Penyusunan perencanaan yang tepat, meliputi ketepatan penganggaran, tepat sasaran, tepat program dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD.
2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan instansi terkait.
3. Penambahan sarana dan prasarana berupa elektronik maupun non elektronik untuk menunjang operasional kegiatan.

4. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan.
5. Perlu Peningkatan kapasitas SDM pelaksanaan program serta penambahan SDM lini lapangan. Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis capaian target indikator sasaran akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarnya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan kinerja ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan sebagai pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) dan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas *keberhasilan/kegagalan* pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi perangkat daerah dan merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah, menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*allignment*” (koordinasi) yang baik, integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN yang didukung oleh aparatur negara yang profesional dan bertanggungjawab. Dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026 (RPJMD). Dalam dokumen tersebut memuat Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Organisasi Perangkat Daerah disertai rencana kinerja

yang terukur dengan pendanaan yang bersifat indikatif dan merupakan instrumen untuk mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cianjur sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini *dimaksudkan* sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur tahun 2021 dalam merealisasikan rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2021 guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Penyusunan laporan ini *bertujuan* :

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2021;
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2021 dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- c. Sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan program pembangunan dan perencanaan kinerja di masa datang;
- d. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) untuk menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

1.3 KELEMBAGAAN DAN APARATUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIANJUR

1.3.1 Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur. No 70 tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendendalian

penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.3.2 Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

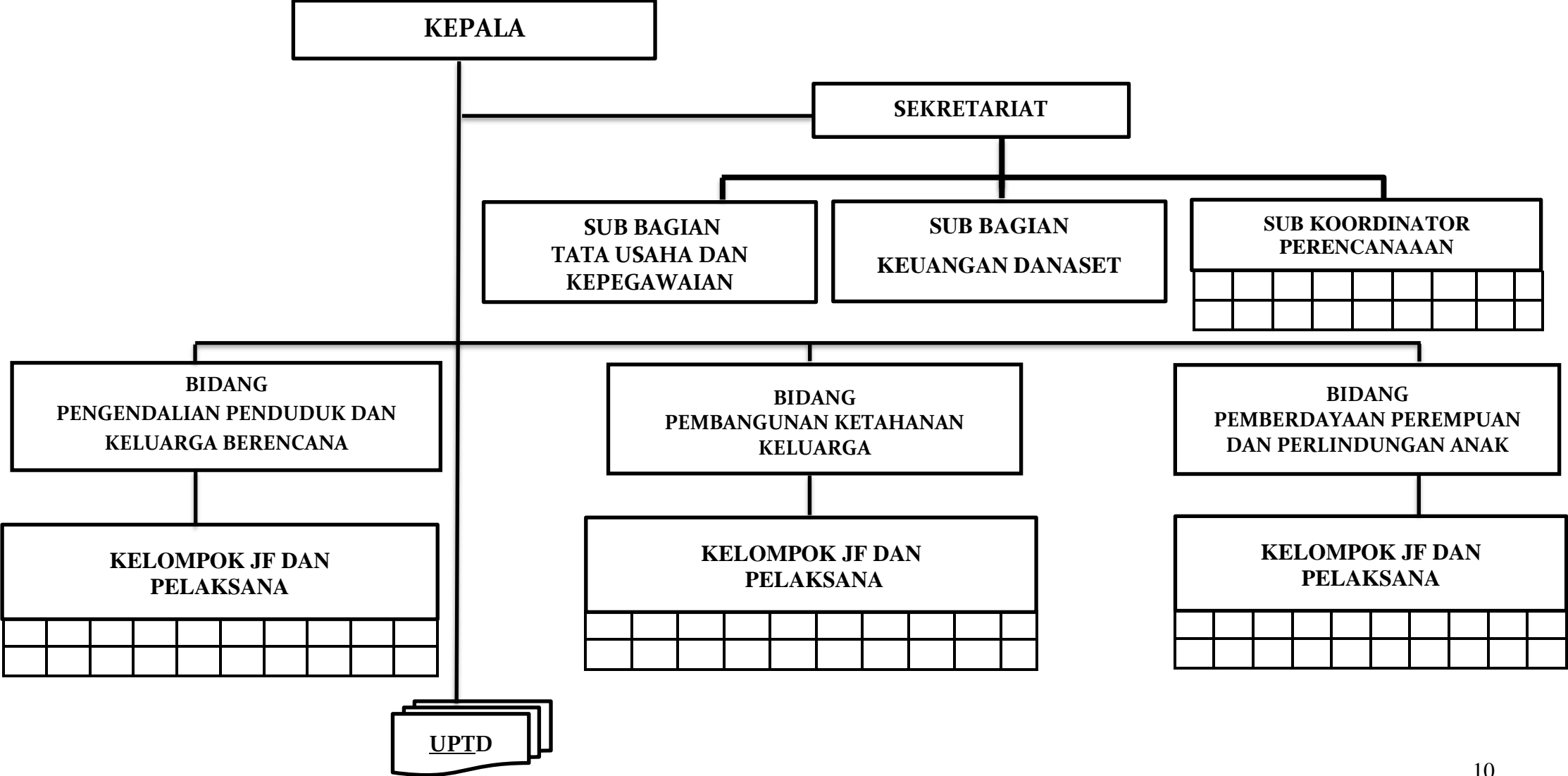
1.3.3 Struktur Organisasi

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, bahwa susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) :
 1. Seksi Pengendalian Penduduk , Data dan Informasi Keluarga;
 2. Seksi Pelayanan KB;
 3. Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan.
- d. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga (PKK)
 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
 2. Seksi Bina Ketahanan Remaja;
 3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;

2. Seksi Perlindungan Anak;
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender.
- f. UPTD.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)



1.4 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam upaya penataan peningkatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu didukung dengan tersedianya sumberdaya yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, SDM dan lain sebagainya. Sumberdaya aparatur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan Pelayanan Pengendalian penduduk kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam upaya peningkatan tersebut.

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur sebanyak 613 Orang terdiri dari PNS 78 Orang dan Tenaga Lini Lapangan sebanyak 508 orang dan honorer sebanyak 27 orang Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	3 Orang
5.	Kepala Seksi	9 Orang
6.	Penyuluh Keluarga Berencana PKB	27 Orang
7.	Pelaksana	12 Orang
8.	UPTD	11 Orang
9.	Kasubag TU UPTD	11 Orang
10.	TPD	115 Orang
11.	PPL Posyandu	360 Orang
12.	Koordinator Kecamatan	33 Orang
13.	Outsourcing	27 Orang
Jumlah		613 Orang

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

Sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 10 orang, sedangkan jabatan fungsional perencana dan arsiparis 20 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

No	Jabatan/Eselon	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Eselon II b	1	-	1
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	1	2	3
4	Eselon IV a	-	2	2
5	Eselon IV b	-	-	-
6	Fungsional yang disetarakan	3	7	10
7	Fungsional Pelaksana	3	3	6
JUMLAH		9	14	23

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pegawai yang berstatus golongan IV sebanyak 16 orang (32%), Golongan III sebanyak 31 orang (62%), sedangkan golongan II sebanyak 3 orang (6 %).

No	PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Pembina Utama Muda/IV c	-	-	-
2	Pembina Tingkat I / IV b	2	-	2
3	Pembina /IV a	9	5	14
4	Penata Tingkat I/ III-d	8	9	17
5	Penata/ III-c	4	5	9
6	Penatan Muda Tingkat I/ III-b	2	2	4
7	Penata Muda / III-a	1	-	1
8	Pengatur Tingkat I/ II-d	1	-	1
9	Pengatur/ II-c	2	-	2
10	Pengatur Tingkat I/ II-b	-	-	-
11	Pengatur Muda / II-a	-	-	-
12	Juru / I-c	-	-	-
J U M L A H		29	21	50

1.5. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN UTAMA

Sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, issue strategis/permasalahan utama yang dihadapi pada adalah :

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan masih rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga dan kurangnya ketersediaan data pilah gender.
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak terlihat dari meningkatnya kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Belum optimalnya perlindungan anak, terlihat dari lebih tingginya tingkat kekerasan terhadap anak daripada terhadap perempuan.
4. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain :

- a. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan tingginya peserta KB aktif tetapi peserta KB MKJP rendah jika dibandingkan dengan PA-SM (34,34%) dan unmet need tinggi (8,63%)
- b. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender
- c. Perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang ditandai dengan masih banyaknya perkawinan dengan usia wanita < 20 tahun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan setiap instansi pemerintah dibedakan dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) Tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra), serta perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja).

Perencanaan setiap instansi daerah di susun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah daerah serta kondisi terkini.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2021-2026 sebagai pedoman dalam menetapkan rencana kerja.

2.1.1. Visi dan Misi

Pokok-pokok visi merupakan keinginan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang merupakan kondisi yang diinginkan, refleksi kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus diharapkan dapat menjawab permasalahan utama/pokok dan isu-isu strategis daerah antara lain :

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Rendahnya kualitas pembangunan manusia	Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur yang berkualitas	Cianjur Manjur Berakhlak Mulia
2	Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah	Kabupaten Cianjur yang mandiri dalam ekonomi	
3	Masih kurangnya infrastruktur baik secara kuantitas dan kualitas	Penataan Infrastruktur Daerah Kabupaten Cianjur yang handal dan bermanfaat	
4	Kehidupan sosial yang masih belum optimal	Peningkatan kehidupan sosial yang mandiri dan religius	
5	Kualitas Sumber Daya Alam yang masih kurang terkelola	Sumber Daya Alam Kabupaten Cianjur yang bermanfaat, berkualitas dan berkelanjutan	
6	Pelayanan publik yang belum optimal	Inovasi pelayanan publik untuk memberikan layanan ke masyarakat secara optimal	
7	Tantangan era industri 4.0	Kabupaten Cianjur Siap menghadapi era industri 4.0	
8	Masa Pandemi Covid-19	Kabupaten Cianjur bersama mengusung era <i>New Normal</i>	

Berdasarkan perumusan visi yang mengacu pada permasalahan utama/pokok dan isu-isu strategis daerah serta janji politik dari kepala daerah yang terpilih, maka visi Kabupaten Cianjur untuk RPJMD periode 2021-2026, adalah sebagai berikut :

CIANJUR MANJUR BERAKHLAK MULIA

Visi Kabupaten Cianjur untuk RPJMD tahun 2021-2026 memiliki pilar-pilar seperti yang dijelaskan di bawah ini :

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Visi
Cianjur Manjur Berakhlak Mulia	Pembangunan sumber daya manusia (Maju, Religius, Berakhlak Mulia)	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas Bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Pembangunan sumber daya manusia diupayakan melalui : 1) layanan kesehatan yang terjangkau, 2) layanan Pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas, 3) perlindungan social dan kesejahteraan rakyat, 4) Peningkatan kehidupan sosial yang mandiri dan religius.
	Pembangunan ekonomi berkelanjutan (Mandiri)	Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi dapat tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian Kabupaten Cianjur. Potensi unggulan perekonomian Kabupaten Cianjur yaitu : 1) pertanian dalam skala luas meliputi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan, 2) pariwisata alam dan budaya, 3) UMKM. Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam Kabupaten Cianjur yang melimpah didukung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
	Pemerataan Pembangunan (Maju, Mandiri)	Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Barat, dengan demikian pemerataan pembangunan menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah.
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi (Maju)	Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai <i>good governance</i> dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Penyelenggaraan <i>e- Government</i> merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi memberikan gambaran yang lebih jelas atas penggambaran visi yang ingin dicapai dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur pada periode 2021-2026 yang dilakukan dengan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur dapat diwujudkan melalui misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2021-2026.

Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut *era society* 5.0;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup;
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju *era governance* 3.0.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan angka kelahiran
2. Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mengendalikan Angka Kelahiran, dengan sasaran dan indikator sasaran sbb :

Sasaran : Meningkatnya Tingkat Kesertaan ber-KB, dengan indikator sasaran : “Rasio akseptor KB”.

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga, dengan sasaran dan indikator sasaran sbb :

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Keluarga, dengan indikator sasaran : “Median Usia Kawin Pertama (MUKP)”

Tujuan 3 : Meningkatkan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak, dengan sasaran dan indikator sasaran sbb :

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Menurunnya Angka kekerasan Terhadap Anak, dengan indikator sasaran : “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Prefelensi Anak 13-17 yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya (%)”.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
1	Meningkatnya Tingkat Kesertaan ber-KB	Rasio Akseptor KB		56,36	56,75	57,16	57,89	58,55	59,15	61,33
2.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		18	18	18	18	18	19	19
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		25,20	27,25	30,10	35,25	40,20	42,35	44,25
4.	Menurunnya Angka kekerasan Terhadap Anak	Prevalensi Anak 13-17 yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya (%)		21	19	7	15	13	11	10

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkup pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi sangat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2021, Prioritas dan Plafonisasi Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tingkat Kesertaan ber-KB	Angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun)	2.36
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Kategori Evaluasi Anugerah Prahita Ekapraya (APE)	Utama
3.	Meningkatnya Perlindungan Hak-hak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya

Tabel 2.3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
1	Meningkatnya Tingkat Kesertaan ber-KB	Rasio Akseptor KB	37,324,999,300	36,151,000,206	97.11
2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	1,594,500,000	1,452,248,000	91.08
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	630,445,000	626,164,000	99.32
4	Menurunnya Angka kekerasan Terhadap Anak	Prefelensi Anak 13-17 yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya (%)	172,723,000	172,719,600	99.99

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dari perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah secara transparan mengenai keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi dalam kurun waktu / periode 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program / kegiatan. Pengukuran Kinerja dilakukan secara sistematis terhadap Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat tingkat akuntabilitas kinerja dalam pencapaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2021. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dititikberatkan pada sasaran strategis pembangunan yang menjadi target pencapaian, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target capaian yang telah ditetapkan .

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan, maka diberlakukan kriteria nilai capaian kinerja sebagai tabel berikut :

- 90 – 100 = Amat Baik
- 80 – 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < - 49 = Kurang

Hasil pengukuran kinerja masing- masing sasaran akan diuraikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Akseptor KB	56,36	56,75	72,08	127%	61,33	78,19%
2	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	18	18	data belum terbit di BPS)	data belum terbit di BPS)	19	-
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	25,20	27,25	29,30	107%	44,25	86,03%

4	Prevalensi Anak13-17 yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya (%)	21	19	18	94,73%	10	116%
---	---	----	----	----	--------	----	------

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tingkat Kesertaan ber-KB	Rasio Akseptor KB	56,36	56,75	72,08	127%	61,33	117
2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	18	18	data belum terbit di BPS)	data belum terbit di BPS)	19	-
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	25,20	27,25	29,30	107%	44,25	66,19
4	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Anak	Prevalensi Anak 13-17 yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya (%)	21	19	18	94,73%	10	180

3.2 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran strategis meningkatnya Tingkat Kesertaan ber-KB masyarakat dalam ber-KB dengan indikator kinerja Rasio Akseptor KB targetnya sebesar 56,75% dapat tercapai sebesar 72,08% sehingga tingkat capaian adalah 127% dengan realisasi anggaran sebesar 97,11% sehingga menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,89%

Sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender targetnya sebesar 27,25% dapat tercapai sebesar 29,30% sehingga tingkat capaian adalah 107% dengan realisasi anggaran sebesar 99,32% sehingga menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,68%

**Tabel 3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Hanya untuk capaian kinerja \geq 100%)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tingkat Kesertaan ber-KB	Rasio Akseptor KB	127%	97.11	2,89
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	107%	99.32	0,68

3.3 RINCIAN PENCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PADA MASING-MASING SASARAN

Rincian pencapaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Tingkat Kesertaan ber-KB	Rasio Akseptor KB	56,75	72,08	127%	Program Pengendalian Penduduk	150.000.000	147.750.000	98,50%
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	37.174.999.300	36.003.250.206	96,85%
2.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	18	(Data belum terbit di BPS)	(data belum terbit di BPS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.594.500.000	1.452.248.000	91,08%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	27,25	29,30	107%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	530.445.000	530.445.000	100%
4.	Menurunnya Angka kekerasan Terhadap Anak	Prevalensi Anak 13-17 yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya (%)	19	18	94,73%	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	172.723.000	172.723.000	100%

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk memenuhi surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Dengan memperhatikan kondisi tersebut diatas maka kegiatan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur dapat dikatakan efisien, karena kegiatan yang dilakukan cap

Selain targetnya rata-rata 100 % dan anggaran atau masukan yang direalisasikan sebesar 98,23%

Semua ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam keseluruhan kegiatan. Semoga hasil capaian kinerja pada tahun anggaran 2021 ini dapat dijadikan dasar evaluasi bagi perencanaan, kebijakan, serta pelaksanaan program selanjutnya.

Cianjur, 11 Februari 2022
Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Cianjur,

HERI SUPARJO, SKM. MH
NIP.19670910 198901 1 001